



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

Jl. Soekarno Hatta (Trikora) No.2 Kota Banjarbaru (70714) Telp/Fax : (0511) 4791374
Website : www.kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id | e-Mail : kejaribanjarbaru@gmail.com

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
NOMOR : KEP- 7 / O.3.20 / Cr.5 / 02 / 2024
Tentang
Penunjukan Pejabat Penghubung
Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
Di Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Tahun 2024

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk tujuan memberikan akses seluas luasnya dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di kejaksaan negeri Banjarbaru, dipandang perlu untuk bertugas sebagai pejabat penghubung pengelolaan SIPPN.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional.
6. Surat Karocana Kejaksaan Agung RI selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasioanl.
5. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : KEP-05/O.3.20/Cr.5/03/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

MEMERINTAHKAN

- Kepada** : Nama : Dwinanda Pramadhanisidi Karim, S.H. (*selaku ketua UPG*)
Jabatan : Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Nama : Imma Purnama Sari, S.H.,M.H
Jabatan : Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Nama : Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H.
Jabatan : Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Nama : Sugeng Wibowo Saputro, S.H., M.H.
Jabatan : Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Nama : Ganes Adi Kusuma, S.H.
Jabatan : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Nama : Sahidanoor, S.H.
Jabatan : Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Banjarbaru

- Untuk** :
1. Melakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk tujuan memberikan akses seluas luasnya dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di kejaksaan negeri Banjarbaru,.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan.

Demikian Surat Perintah Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tahun 2024 di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarbaru dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 20 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU,



HADIYANTO, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740121 200003 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel.
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Kalsel.
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kalsel.
5. A r s i p